
PERAN KABUPATEN LAHAT DALAM REVOLUSI FISIK DI SUMATERA SELATAN TAHUN 1947-1949

Muhammad Reza Pahlevi✉, Syafruddin Yusuf, & Alian

Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima november 2020
Disetujui desember 2020
Dipublikasikan Desember 2020

Keywords:
Pertempuran lima hari lima malam, lahat, revolusi, kemerdekaan

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk merekonstruksi kembali bagaimana situasi di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Lahat pada masa Revolusi Fisik tahun 1947-1949. Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana peran Kabupaten Lahat dalam Revolusi Fisik tahun 1947-1949. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kabupaten Lahat dalam Revolusi Fisik tahun 1947-1949. Metode yang digunakan adalah metode sejarah (historis) yang dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti heuristik (pengumpulan sumber-sumber), kajian terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, verifikasi data, interpretasi, dan terakhir penulisan sejarah itu sendiri (historiografi). Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu sumber primer dan sumber sekunder yang diperoleh dari buku maupun informan yang berkaitan dengan permasalahan. Perjuangan rakyat Lahat merupakan rangkaian dari perjuangan rakyat Sumatera Selatan dalam menghadapi Belanda setelah berakhirnya Pertempuran Lima Hari Lima Malam di Palembang. Setelah pertempuran itu, Belanda melancarkan Agresi Militer I tanggal 21 Juli 1947 yang kemudian disusul dengan Agresi Militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Kabupaten Lahat memegang peran yang penting pada masa awal kemerdekaan karena pernah menjadi pusat pemerintahan sipil pada masa Kereseidenan Palembang dan sekaligus menjadi salah satu Markas Divisi TKR di Sumatera Selatan ketika itu

Abstract

This research was conducted to reconstruct the situation in South Sumatra, especially in Lahat Regency during the Physical Revolution in 1947-1949. The formulation of the problem in this research is how the role of Lahat Regency in the Physical Revolution in 1947-1949. This study aims to determine the role of Lahat Regency in the Physical Revolution of 1947-1949. The method used is the historical method (historical) which is carried out through stages such as heuristics (collection of sources), study of literature related to the object of research, data verification, interpretation, and finally the writing of history itself (historiography). Sources of data used in this study are primary sources and secondary sources obtained from books and informants related to the problem. The struggle of the Lahat people is a series of the struggle of the people of South Sumatra in facing the Dutch after the end of the Five Days and Five Nights Battle in Palembang. After that battle, the Dutch launched Military Aggression I on July 21, 1947 which was then followed by a second Military Aggression on December 19, 1948. Lahat Regency played an important role in the early days of independence because it had been the center of civilian government during the Palembang Presidency and at the same time became one of the one TKR Division Headquarters in South Sumatra at that time

© 2020 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Ruang Jurnal Sejarah, Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: mrpahlevi@fkip.unsri.ac.id

PENDAHULUAN

Tanggal 19 Agustus tahun 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidangnya yang kedua. Dalam sidang ini berhasil diputuskan tentang pembagian wilayah Indonesia yang dibagi atas delapan provinsi. Kedelapan provinsi yang dimaksud adalah Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Maluku, Sunda kecil (Nusa Tenggara, Bali, NTB dan NTT). Masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur yang membawahi sejumlah keresidenan. Provinsi Sumatera sendiri telah ditunjuk Mr. Teuku Mohammad Hasan sebagai gubernur dengan pusat pemerintahan di Bukit Tinggi. Sementara itu, dalam tingkat provinsi, di Sumatera terdiri dari beberapa keresidenan yang dipimpin masing-masing oleh seorang residen yang membawahi beberapa kota dan kabupaten.

Kabupaten Lahat merupakan bagian dari Keresidenan Palembang. Kabupaten ini dipimpin oleh seorang Bupati. Dalam catatan sejarah, kabupaten ini banyak memberikan andil dalam perjuangan membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama pada masa Agresi Militer Belanda satu dan dua. Peranan rakyat Lahat sebenarnya sudah dimulai sejak awal kemerdekaan dengan pembentukan badan-badan perjuangan dan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dalam proses pembentukan TKR di Lahat, beberapa tokoh *eks* gyugun Pagaralam seperti M. Nuh (Merapi), Maluddin Simbolon, Ali Jati, A. Karim Kadir, Robani Kadir, Umar Ibrokhi, A. Satar Lenggang dan Maris membentuk Badan Penjaga Keamanan Rakyat (BPKR) yang merupakan cikal-bakal TKR di

Lahat. Selain pembentukan BPKR, terdapat pula organisasi pejuang lainnya, misalnya Barisan Rakyat (Bara) yang dipimpin oleh A. Satar, Barisan Hizbullah yang dipimpin oleh Yusuf Aminullah, serta Barisan Para Pemuda Seinendan dipimpin oleh Abdullah Kadir. Pembentukan BPKR juga terjadi di Kewedanaan Tebing Tinggi yang diinisiasi oleh Zainal Abidin Ning, Yahya Bahar dan Nurdin Panji. Sedangkan di Kewedanaan Pagaralam digagas oleh Djarab, Harun Sohar, A. Sanaf, Hamid Jemair, H. Mansyur, Syamsul Bahri Umar, M. Yunus, Ruslan dan Syamsul Bahrun.

Respon yang positif dari masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakatnya dalam membangun kekuatan pertahanan di Lahat telah menempatkan Lahat sebagai Markas Divisi I TKR Sumatera Selatan di bawah pimpinan Kolonel Simbolon. Oleh karena itu Lahat termasuk daerah yang menjadi target sasaran pendudukan Belanda pada masa Agresi Pertama (1947) dan Agresi Kedua (1948-1949). Berbagai pertempuran sebagai usaha untuk mempertahankan panji-panji kemerdekaan di Kabupaten Lahat menjadi hal yang menarik untuk dikaji di dalam penelitian ini.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah atau yang biasa dikenal dengan metode historis. Metode historis menurut Sjamsuddin (2007: 17) merupakan suatu proses pengkajian, penjelasan, dan penganalisaan secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau. Tujuan dari metode historis sendiri adalah untuk membuat sebuah rekonstruksi dari sebuah peristiwa di masa lampau secara sistematis dan objektif dengan langkah-langkah

ilmiah seperti pengumpulan data-data (Heuristik), memverifikasi dan mengevaluasi data (Kritik), dan menginterpretasikannya menjadi sebuah fakta (historiografi) guna memperoleh suatu kesimpulan dari sebuah rangkaian peristiwa yang utuh.

Melengkapi data penelitian tulisan ini tak lupa penulis juga melakukan kajian pustaka guna memperkuat dan menemukan fakta-fakta sejarah baru. Adapun data yang dipaparkan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Kabupaten Lahat Sebelum Kemerdekaan

Setelah dihapuskannya Kesultanan Palembang oleh Pemerintah Belanda tahun 1825, semua wilayah kekuasaan kesultanan beralih di bawah pemerintahan kolonial. Dengan demikian bentuk pemerintahan ada di Palembang saat itu juga mengalami perubahan dari yang semula berbentuk kesultanan kemudian berubah menjadi sistem keresidenan. Adapun residen pertama yang berkuasa di Palembang saat itu adalah Jan Isaac Van Sevenhoven. Sejak saat itu, untuk menjalankan pemerintahan di *eks* kesultanan Palembang, Belanda menerapkan birokrasi pemerintahan yang berbeda dengan masa Kesultanan Palembang.

Untuk daerah di luar Palembang, maka dibentuk beberapa *Afdeeling* yang dipimpin oleh seorang Asisten Residen. Setelah mengalami beberapa kali penyederhanaan *afdeeling*, pada tahun 1930, Keresidenan Palembang dibagi menjadi tiga *afdeeling*. Ketiga *afdeeling* itu adalah *Afdeeling* Palembang Ilir

atau *Palembangsche Beneden Landen*, *Afdeeling* Ogan dan Komerling Ulu dan *Afdeeling* Palembang Ulu atau *Palembangsche Bovenlanden*.

Dalam sistem birokrasi kolonial seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Lahat masuk ke dalam wilayah *Afdeeling* Palembang Ulu atau *Palembangsche Bovenlanden*. *Afdeeling* ini berkedudukan di Lahat yang dipimpin oleh seorang asisten residen. *Afdeeling* ini membawahi beberapa *Onder Afdeeling*, yaitu 1) *Onder Afdeeling* Lematang Hulu yang dipimpin oleh seorang Kontrolleur yang berkedudukan di Lahat; 2) *Onder Afdeeling* Lematang Hilir, dipimpin seorang Kontrolleur yang berkedudukan di Muara Enim; 3) *Onder Afdeeling* Tanah Pasemah, dipimpin seorang Kontrolleur yang berkedudukan di Pagaram; 4) *Onder Afdeeling* Tebing Tinggi, dipimpin seorang Kontrolleur yang berkedudukan di Tebing Tinggi, dan; 5) *Onder Afdeeling* Musi Ulu, dipimpin seorang Kontrolleur yang berkedudukan di Muara Beliti. Sistem pemerintahan Hindia Belanda ini berlangsung selama lebih kurang 12 tahun, yaitu sejak tahun 1930 hingga tahun 1942 saat Jepang menduduki Indonesia.

Penjajahan Jepang

Peralihan kekuasaan pemerintahan antara pihak Belanda dan Jepang didasarkan pada Perjanjian Kalijati tanggal 8 Maret 1942 yang ditandatangani oleh Letjen Ter Poorten dan Gubernur Jenderal Tjarda S.S dari pihak Belanda, dan Letjen Hitoshi Imamura dari pihak Jepang. Dalam perjanjian itu dinyatakan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan daerah kekuasaan Belanda diserahkan kepada Jepang. Sejak itu maka kekuasaan di

seluruh wilayah eks Hindia Belanda dipegang oleh Jepang hingga menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945.

Dengan berubahnya kekuasaan di Hindia Belanda, maka kedudukan afdeeling di Sumatera Selatan juga dihapuskan. Lahat sendiri pada masa itu berstatus sebagai *Gun* yang jika disetarakan dengan sistem birokrasi pemerintahan Belanda sama dengan wilayah *onder-afdeeling*. *Gun Cho* (pemimpin *Gun*) yang bertugas di Lahat selama masa Jepang adalah Abdul Rozak yang kelak pada awal kemerdekaan menjadi Wakil Residen dan Residen Palembang. *Gun cho* menempati kantor asisten residen pada masa Belanda yang berada di tepian Sungai Lematang kawasan Benteng Lahat.

Pagaralam yang ketika itu berada di dalam wilayah *Gun* Lahat menjadi salah satu tempat pendidikan militer khususnya bagi mereka yang berada di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Palembang, Lampung, Bengkulu dan Jambi). Pendidikan militer dimaksud adalah *Gyugun Kanbu* atau lengkapnya *Sumatora Gyugun Kanbu* yang melatih calon perwira militer dalam menghadapi pertempuran. Beberapa pemuda Lahat yang mengikuti pendidikan *Gyugun* ini antara lain adalah M. Nuh, Harun Sohar, Jarab, Barlian, Satar Lenggang, A. Karim Kadir, Ruslan, dan Syamsul Bahri Umar (Tatung). Para pemuda dari *Gyugun* inilah yang nantinya menjadi pelopor berdirinya BKR/TKR di Sumatera Selatan dan mempunyai peran yang sangat penting pada masa Revolusi Fisik.

Proklamasi Kemerdekaan di Lahat

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui kajian sumber dan wawancara,

belum ditemukan dokumen resmi ataupun catatan dari tokoh masyarakat Lahat yang menyebutkan kapan berita proklamasi Kemerdekaan Indonesia diterima di Lahat. Namun diperkirakan berita proklamasi itu telah diterima secara diam-diam pada tanggal 19 Agustus 1945 dari Pagaralam. Hal tersebut dimungkinkan mengingat Pagaralam merupakan daerah pusat pendidikan militer Jepang (*Gyugun Kanbu*) yang memiliki jalinan komunikasi dengan pusat Pemerintahan Jepang di Jakarta.

Berita Proklamasi di Pagaralam sendiri diterima oleh M. Siddik Adim, dkk pada 19 Agustus 1945. Sesaat setelah menerima berita proklamasi tersebut mereka segera menemui kepala kepolisian Pagaralam, Khaibu Syahri untuk meminta izin menaikkan Bendera Merah Putih. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Khaibu Syahri mengingat kedudukan Jepang pada saat itu sangat kuat di Pagaralam sehingga dikhawatirkan tindakan itu akan memancing kemarahan pihak Jepang yang dapat berakibat buruk bagi masyarakat di Pagaralam.

Dua hari kemudian (21 Agustus 1945), Bendera Merah Putih dinaikan di depan toko Datuk Sri Maharaja di Pasar Pagaralam. Proses penaikan bendera tersebut dilakukan dengan upacara kecil yang dipimpin oleh M. Hasyim R, didampingi oleh M. Siddik Adim dan Datuk Sri Maharaja. Upacara tersebut diikuti oleh sekitar empat puluh orang pemuda yang dipimpin Sofyan Rasyad. Penaikan bendera dilakukan oleh Kenasin dan dibantu anggota pandu Hisbul Wathon, sedangkan yang memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya adalah M. Munir RT. Sumber lain memberikan informasi bahwa Bendera Merah Putih untuk pertama kalinya dikibarkan di Gedung Perjuangan yang terletak

di pinggir jalan ke dusun Pematang Bange, depan rumah Wedana Tanah Pasemah (sekarang Kantor Kejaksaan dekat SMA N 1 Pagaram) (Luhar, 1972; Basri, 2002: 5).

Berita proklamasi kemerdekaan tersebut dengan cepat menyebar ke daerah sekitar Pagaram, termasuk Lahat yang hanya berjarak 2 jam perjalanan.

Pembentukan Badan-Badan Perjuangan

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia membawa konsekuensi pada upaya untuk mengambil alih kekuasaan dari pihak Jepang yang masih berada di Lahat. Setidaknya, terdapat dua hal yang penting yang harus dilakukan oleh tokoh-tokoh perjuangan ketika itu yaitu *pertama*, mempersiapkan pembentukan pemerintahan yang dipegang oleh bangsa Indonesia sendiri dan *kedua*, perlu dipersiapkan pembentukan kekuatan militer untuk menghadapi Jepang saat itu, dan membela serta mempertahankan kemerdekaan yang sudah didapatkan.

Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia terjadi di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Perjuangan itu mengikuti apa yang dilakukan dan diinstruksikan dari pusat pemerintahan di Palembang. Berdasarkan hasil sidang PPKI tanggal 23 Agustus 1945 ditetapkan bahwa untuk menopang Kemerdekaan Indonesia maka dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Instruksi pembentukan BKR ini ditindaklanjuti di Palembang dengan membentuk Badan Penjaga Keamanan Rakyat (BPKR) pada 4 September 1945 (Perwiranegara, 1987: 20). Tujuan dibentuknya badan ini adalah untuk membantu kelancaran dan kemampuan pemerintahan sipil serta menjaga keamanan dan ketertiban di Sumatera Selatan. Umumnya mereka yang mendaftarkan diri sebagai anggota

BPKR adalah mereka yang memiliki basis militer seperti alumni Gyugun, Heiho dan lain-lain.

Pucuk pimpinan BPKR di Palembang dipegang oleh Hasan Kasim, seorang alumni pendidikan Gyugun Pagaram. Ia dibantu oleh para alumni Gyugun Pagaram yang saat itu berada di Palembang. Selain itu, pembentukan BPKR ini juga dilakukan di tingkat kewedanaan di Sumatera Selatan termasuk di Lahat. Pembentukan BPKR di kewedanaan Lahat dilakukan oleh M. Nuh (merapi), Maludin Simbolon, Ali Jati, A. Karim Kadir, Robani Kadir, Umar Ibrokhi, A. Satar Lenggang dan Maris. Kantor Pusat kegiatan BPKR Lahat berada di rumah Efendi Amasin (rumah junjungan Gumai Talang) depan terminal bus Kabupaten Lahat (Basri, 2002: 9).

Selain pembentukan BPKR, terdapat pula organisasi pejuang lainnya, misalnya Barisan Rakyat (Bara) yang dipimpin oleh A. Satar, Barisan Hizbullah yang dipimpin oleh Yusuf Aminullah, barisan para Pemuda Seinden dan dipimpin oleh Abdullah Kadir. Pembentukan BPKR Kewedanaan Tebing Tinggi diinisiasi oleh Zainal Abidin Ning, Yahya Bahar dan Nurdin Panji. Sedangkan di kewedanaan Pagaram oleh Djarab, Harun Sohar, A. Sanaf, Hamid Jemair, H. Mansyur, Syamsul Bahri Umar, M. Yunus, Ruslan dan Syamsul Bahrun (Basri, 2002: 9). Pembentukan Badan perjuangan di Sumatera Selatan pada dasarnya merupakan gerakan spontanitas yang dilakukan oleh eks Gyugun Pagaram. Oleh karena itu belum ada struktur yang jelas tentang organisasi pertahanan saat itu.

Seiring dengan dibentuknya TKR (Tentara Keamanan Rakyat) pada 5 Oktober 1945,

maka BKR diresmikan menjadi TKR. Peresmian BKR menjadi TKR di Palembang dilakukan pada 12 Oktober 1945. Peresmian itu belum disertai dengan penyusunan struktur TKR wilayah Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan belum ada instruksi dan penunjukkan siapa yang diberikan wewenang dari Pusat (Jakarta) untuk membentuk personalia TKR di Sumatera Selatan.

Situasi ini dimanfaatkan oleh Pangeran Emir Mohamad Noer untuk membentuk TKR di Sumatera Selatan. Ia mengadakan pertemuan dengan *eks Gyugun* Pagaram di Lahat pada 14 Oktober 1945. Dalam pertemuan itu hadir antara lain Barlian, M. Nuh, Nurdin Panji, Alamsyah, Syamsul Bahri Umar, Jarab, dan lain-lain. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa akan diadakan rapat lanjutan dalam waktu dekat di Pagaram, untuk membicarakan struktur organisasi TKR di Sumatera Selatan. Sehubungan dengan itu ditunjuk Sanaf untuk mempersiapkan pertemuan tersebut. Berdasarkan keputusan tersebut maka pada bulan Oktober 1945 diadakanlah pertemuan *eks Gyugun* di Bioskop Musi Pagaram (sekarang Pasar Dempo). Pertemuan itu dihadiri oleh sekitar 50 orang *eks Gyugun* Pagaram. Hasil pertemuan tersebut adalah terbentuknya struktur TKR versi Emir Noer sebagai berikut:

- Panglima TKR merangkap Komandan Divisi Lampung Mayjen Pangeran Emir Moh. Noor.
- Kepala Staf : Kolonel Muhammad Nuh
- Komandan Divisi Palembang Ilir (termasuk Bangka Belitung) : Kolonel Hasan Kasim
- Komandan Divisi Palembang Ilir : M. Simbolon

- Komandan Divisi Jambi : Kolonel Abunjani (Yusuf dkk, 2003: 112)

Dari satu sisi tindakan Emir Noer ini baik yaitu berupaya untuk mengkoordinir kekuatan pertahanan di Sumatera Selatan. Namun disisi lain tindakan itu tidaklah tepat, karena dalam melakukan pembentukan tanpa sepengetahuan Residen Palembang A. K Gani. Selain itu di Palembang sudah terbentuk TKR yang dipimpin Hasan Kasim. Hal ini berakibat pada terjadinya dualisme kepemimpinan TKR di Sumatera Selatan. Dalam perkembangannya TKR versi Pangeran Emir ini dibubarkan oleh Residen A. K Gani dan dibentuklah struktur resmi oleh pemerintah, bahkan Emir Noer kemudian ditangkap dan ditahan.

Pembentukan TKR oleh A. K Gani berdasarkan pada penunjukan resmi dari Presiden Soekarno pada 5 Desember 1945. Pembentukan TKR secara resmi dilakukan di Palembang oleh A. K Gani. Hal ini disebabkan Palembang adalah ibukota keresidenan dan pusat pengaturan pemerintahan untuk wilayah Sumatera Selatan.

Struktur TKR resmi tersebut dipimpin oleh Mayjen Soehardjo Hardjowardoyo yang terdiri dari enam Divisi, yaitu Divisi I Sumsel (Lahat) dipimpin Kolonel M. Simbolon, Divisi II Sumsel (Palembang) dipimpin Kolonel Hasan Kasim, Divisi III Bukittinggi dipimpin Kolonel Dahlan Djambek, Divisi IV Sumatera Timur oleh Kol. M. Tahir, Divisi V Aceh (Bireun) Kol. Samaun Gaharu, dan Divisi VI (Sibolga) dipimpin Kol. M. Din.

Divisi I Lahat membawahi empat Resimen, yaitu Resimen I Bengkulu, Resimen II Lahat, Resimen III Tanjung Karang dan Resimen IV Baturaja. Berdasarkan struktur tersebut maka tanggung jawab pertahanan

untuk wilayah Lahat berada di bawah Kolonel M. Simbolon. Sedangkan pertahanan Kabupaten Lahat dibebankan kepada Resimen II Lahat di bawah pimpinan Letkol Harun Sohar. Resimen ini membawahi empat batalion, yaitu Batalion I Pagaram, Batalion II Lahat, Batalion III Lubuk Linggau dan Batalion IV Tanjung Enim.

Struktur Organisasi dan Personil yang ada di Divisi I Lahat adalah sebagai berikut:

Komandan Divisi: Kolonel M. Simbolon
Ajudan : Letnan Dua Usman Yasir dan Letda Jacob Wachid
Kepala Staf : Mayor Nurdin Panji
Bagian Siasat :Kapten M. Arsyad Astrayudha
Sekretariat : Kapten Sidik Umar
Intendance : Kapten Umar Ibrohi
Geni/Perenjataan: Kapten Robani Kadir
Perhubungan : Kapten Kurchie
Penerangan : Mayor Umar Said

Resimen II Divisi I Lahat, terdiri dari:

Komandan : Letnan Kolonel Harun Sohar
Kepala Staf : Mayor P. Hutagalung
Intendance : Kapten Roni
Polisi Tentara : Lettu Suprpto Prio Pranoto
Siasat : Lettu Ali Mansyur
Angkutan : Lettu Asnawi Amaluddin
Kesehatan : Kapten Dr. Muchni.

Sedangkan untuk jabatan Batalion, masing-masing dipegang oleh Mayor Nurdin Panji (pertama), kemudian digantikan oleh Mayor Zainal Abidin Ning dan selanjutnya diganti lagi oleh Kapten Djarab untuk Batalion I Pagaram. Mayor Sai Husin untuk Batalion II di Lahat, Batalion III Lubuk Linggau dipimpin Mayor P. Hutagalung kemudian diganti Kapten

Daud R. S dan Batalion IV Tanjung Enim dipimpin oleh Kapten A. Rivai.

Pelantikan Panglima TKR Divisi I Kolonel M. Simbolon, Panglima Divisi II Kolonel Hasan Kasim, Komandan Resimen 1 Divisi II Letkol Bambang Utoyo dilakukan di lapangan depan Mesjid Agung Palembang pada 27 Januari 1946. Pelantikan dilakukan oleh Panglima Komandemen Sumatera Mayor Jenderal Soehardjo Hardjowardojo dan dihadiri oleh Koordinator Pembentukan TKR Sumatera Letjen (Tituler) dr. A. K Gani. Selain itu juga dilantik Letkol Ibnu Sutowo, Letkol N. S Effendi, Mayor M. Arif, Mayor Dani Effendi, Kapten Makmun Murod, Kapten Anwar Arsyad, Kapten Animan Achyat, Kapten Idham Danal dan Kapten Nefa Hanafiah, Lettu Asnawi Mangkualam, Lettu Djoko Surodjo dan perwira lainnya. Sedangkan perwira TKR dari Divisi I dan II Sumatera Selatan yang memegang jabatan sebagai Komandan Resimen dilantik di lapangan PJKA Lahat pada 17 Pebruari 1946. Mereka yang dilantik antara lain Letkol Barlian, Letkol Harun Sohar, Letkol Iwan Supardi, Mayor Zurbi Bustan, Letkol M. Insya, Mayor Yunus. Perwira lain yang dilantik adalah Mayor Zainal Abidin Ning, Kapten Djarab, Kapten Syamsul Bahri Umar, Syamsul Bahrum, M. Sai Sohar dan Yahya Bahar (Nasution, 1976: 228; Effendi, 1973: 7).

Pada tanggal 17 Mei 1946, organisasi ketentaraan mengalami perubahan struktur sebagai hasil dari Konferensi Tentara yang dilakukan di Bukittinggi. Keputusan penting yang menjadi hasil kesepakatan dalam konferensi tersebut yaitu *pertama*, membubarkan semua divisi yang ada di Sumatera, dan *kedua*, membagi pertahanan Sumatera menjadi tiga wilayah sub komandemen yaitu Sub Komandemen Sumatera

Utara (Subkosut), Sub Komandemen Sumatera Tengah, dan Sub Komandemen Sumatera Selatan (Subkoss) (Murod, 2005).

Subkoss terdiri dari dua Divisi, yaitu Divisi I Garuda yang berkedudukan di Lahat dan Divisi II Garuda berkedudukan di Palembang. Divisi I Garuda membawahi 4 Resimen, yaitu Resimen XI di Tanjung Karang, Resimen XII Baturaja, Resimen XIII Lahat dan Resimen XIV Bengkulu. Resimen XIII Lahat membawahi tiga batalion yaitu Batalion I di Pagaram, Batalion II di Lahat dan Batalion III di Tanjung Enim. Dengan demikian tanggungjawab pertahanan di wilayah Lahat berada di bawah Batalion II Resimen XIII yang dipimpin oleh Mayor Sai Husin dari Divisi I Garuda Lahat.

Peran Kabupaten Lahat dalam Revolusi Fisik

Seiring dengan upaya untuk mempertahankan Kemerdekaan Indonesia, Kabupaten Lahat mempunyai peran yang cukup penting sejak awal proklamasi hingga berakhirnya masa Revolusi Fisik. Daerah ini menjadi pusat kegiatan yang mengatur pemerintahan dan pertahanan di Keresidenan Palembang. Dari segi pertahanan, Lahat merupakan markas Divisi VIII Garuda di bawah pimpinan Kolonel M. Simbolon dan sebagai juga sebagai markas Divisi I TKR Sumatera Selatan dibawah pimpinan Letkol Barlian. Sedangkan dari aspek pemerintahan, Lahat ketika itu juga merupakan pusat pemerintahan sipil dari Keresidenan Palembang. Hal ini terjadi karena Palembang dikuasai oleh Belanda pasca Pertempuran Lima Hari Lima Malam 1 sampai 5 Januari 1947. Sehingga untuk mengaktifkan jalannya pemerintahan, maka dilakukan pemindahan pusat pemerintahan dari Palembang ke Lahat. Residen Palembang Abdul

Rozak dan pimpinan jawatan keresidenan kemudian pergi ke Lahat, sedangkan Wakil Residen, dr. Slamet Wironoto dan wakil-wakil kepala jawatan tetap berada di Palembang. Pusat Pemerintahan Keresidenan Palembang di Lahat berlangsung setelah Perang Lima Hari Lima Malam hingga menjelang terjadinya Agresi Belanda yang pertama pada Juli 1947.

Dalam masa-masa perjuangan, upaya mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia oleh TNI dan laskar perjuangan lainnya serta elite tradisional dan masyarakat Lahat, secara serentak dan bersama-sama berjuang menghadapi Belanda. Perjuangan tersebut dimulai dari upaya mencegah masuknya Belanda ke Lahat hingga berbagai perang gerilya yang terjadi baik di dalam maupun di luar Kabupaten Lahat selama masa Agresi Militer I dan II Belanda.

Selain itu, Lahat juga pernah menjadi tempat perundingan antara pihak Belanda dengan pihak republik untuk mengakhiri pertempuran-pertempuran di Keresidenan Palembang setelah Agresi Militer I Belanda. Perundingan tersebut diadakan di depan Rumah Dinas Bupati Lahat saat itu yaitu di daerah Benteng di tepi Sungai Lematang. Hasil perundingan itu ditentukan bahwa batas demarkasi antara pasukan Belanda dengan TNI adalah daerah Sungai Empayang Saung Naga. Berkaitan dengan demarkasi tersebut, maka Tebing Tinggi dan Pagaram menjadi Daerah terdepan front pertahanan TNI untuk menghadapi Belanda yang saat itu berkuasa di Lahat.

Selama masa Agresi Militer kedua Belanda, beberapa dusun di Lahat memberikan peran yang sangat penting dalam melindungi pejabat pemerintahan maupun militer dari

penangkapan dan serangan Belanda. Di antara dusun-dusun tersebut, ada Dusun Nanjungan di Pasemah Air Keruh yang menjadi markas TNI Sub Teritorial Palembang (STP) di bawah pimpinan Letkol Bambang Utoyo. Dari Desa Nanjungan inilah strategi dan perlawanan terhadap Belanda diatur. Ini dapat terjadi karena adanya partisipasi dari rakyat yang mendukung kebutuhan logistik tentara saat itu. Desa Nanjungan merupakan desa yang merdeka dan sepenuhnya dikuasai oleh TNI dibawah pimpinan Letkol Bambang Utoyo hingga terjadinya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada Desember 1949 (Umar, 2002 : 3-4; Said, 2003).

Daerah lain di Kabupaten Lahat yang memegang peran penting pada masa Revolusi Fisik adalah Pagaram (sekarang sudah memisahkan diri dari Kabupaten Lahat menjadi Kota Pagaram). Daerah ini penting karena menjadi tempat serah terima wilayah Keresidenan Palembang yang dilakukan antara pihak Belanda dengan republik. Adapun yang menerima penyerahan kedaulatan adalah Residen Abdul Rozak, sedangkan dari pihak militer adalah Kapten M. Rasyad Nawawi. Selama masa Revolusi Fisik, perjuangan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia bukan hanya dilakukan oleh TNI, Polisi, Laskar Perjuangan, dan aparat pemerintahan sipil saja. Perjuangan juga dilakukan oleh rakyat dan para elit tradisional yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat Lahat. Bentuk perjuangan mereka antara lain adalah memberikan bantuan logistik berupa konsumsi makanan dan tempat tinggal bagi para pejuang. Ini sebuah perwujudan dari konsep Perang Semesta yang digagas oleh Kolonel A. H Nasution. Daerah lain di Kabupaten Lahat yang memegang peran

penting pada masa Revolusi Fisik adalah Pagaram (sekarang sudah memisahkan diri dari Kabupaten Lahat menjadi Kota Pagaram). Daerah ini penting karena menjadi tempat serah terima wilayah Keresidenan Palembang yang dilakukan antara pihak Belanda dengan republik. Adapun yang menerima penyerahan kedaulatan adalah Residen Abdul Rozak, sedangkan dari pihak militer adalah Kapten M. Rasyad Nawawi. Selama masa Revolusi Fisik, perjuangan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia bukan hanya dilakukan oleh TNI, Polisi, Laskar Perjuangan, dan aparat pemerintahan sipil saja. Perjuangan juga dilakukan oleh rakyat dan para elit tradisional yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat Lahat. Bentuk perjuangan mereka antara lain adalah memberikan bantuan logistik berupa konsumsi makanan dan tempat tinggal bagi para pejuang. Ini sebuah perwujudan dari konsep Perang Semesta yang digagas oleh Kolonel A. H Nasution.

KESIMPULAN

Kabupaten Lahat secara umum mempunyai peran yang penting sejak awal proklamasi hingga berakhirnya masa Revolusi Fisik. Peran Lahat di antaranya adalah sebagai markas Divisi I TKR Sumatera Selatan di bawah pimpinan Letkol Barlian dan juga sebagai Pusat Pemerintahan Keresidenan Palembang setelah Perang Lima Hari Lima Malam (1-5 Januari 1947) hingga menjelang terjadinya Agresi Belanda yang Pertama (Juli 1947).

Selain itu Kabupaten Lahat juga pernah menjadi tempat perundingan antara pihak Belanda dengan Republik untuk mengakhiri pertempuran-pertempuran di

Keresidenan Palembang setelah Agresi Militer Belanda I. Perundingan itu diadakan di depan Rumah Dinas Bupati Lahat saat itu, yaitu di daerah Benteng di tepi Sungai Lematang. Hasil perundingan itu ditentukan bahwa batas demarkasi antara pasukan Belanda dengan TNI adalah daerah Sungai Empayang Saung Naga. Berkaitan dengan demarkasi tersebut, maka Tebing Tinggi dan Pagaralam menjadi daerah terdepan front pertahanan TNI untuk menghadapi Belanda yang saat itu berkuasa di Lahat.

Selama masa Agresi Militer Belanda Kedua, beberapa dusun di Lahat memberikan peran yang penting dalam melindungi pejabat pemerintahan maupun militer dari penangkapan dan serangan Belanda. Dusun Nanjungan di Pasemah Air Keruh menjadi markas TNI Sub Teritorial Palembang (STP) di bawah pimpinan Letkol Bambang Utoyo. Dari Dusun Nanjungan inilah strategi dan perlawanan terhadap Belanda diatur. Ini dapat terjadi karena adanya partisipasi dari rakyat yang mendukung kebutuhan logistik tentara saat itu. Dusun Nanjungan merupakan dusun yang merdeka dan sepenuhnya dikuasai oleh TNI di bawah pimpinan Letkol Bambang Utoyo hingga terjadinya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada Desember 1949.

Daerah lain di Kabupaten Lahat yang memegang peran penting pada masa Revolusi Fisik adalah Pagaralam (sekarang sudah memisahkan diri dari Kabupaten Lahat dan menjadi Kota Pagaralam). Daerah ini menjadi penting karena menjadi tempat peristiwa serah-terima wilayah Keresidenan Palembang yang dilakukan antara pihak Belanda dengan republik. Adapun yang menerima penyerahan kedaulatan adalah Residen Abdul Rozak,

sedangkan dari pihak militer adalah Kapten M. Rasyad Nawawi.

Selama masa Revolusi Fisik, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia bukan hanya dilakukan oleh TNI, Polisi dan Laskar Perjuangan, serta aparat pemerintahan sipil. Perjuangan juga dilakukan oleh rakyat dan para elit tradisional yang mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat Lahat. Bentuk perjuangan mereka adalah memberikan bantuan logistik berupa makanan dan tempat tinggal bagi para pejuang. Ini merupakan perwujudan dari konsep Perang Semesta yang dikumandangkan oleh Kol. A.H Nasution.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Hasan dkk. 2002. *Inventarisasi Sejarah Perjuangan Rakyat Lahat (1945-1949)*. Dokumen Pribadi. Tidak diterbitkan.
- Effendi, Dani, 1973. *Gema Perang Rakyat di Sumatera Selatan 1945-1949*. Jakarta.
- Luhar, M. Saman. 1972. *Guritan Jagat Pasemah*. Dokumen Pribadi.
- Murod, Makmun, 2005. *Naskah Bahan Revisi Buku Subkoss*.
- Nasution. A. H, 1976. *Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 3. Perjuangan Rakyat Sumatera Bagian Selatan tahun 1945-1949*. Jakarta: Kantor Menko Kesra.
- Said, H.A Zawawi. 2003. *Pengabdian: Otobiografi H. Makmun Murod Veteran Pejuang Kemerdekaan RI*. Jakarta : Tanpa nama Penerbit.
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Syafruddin Yusuf, dkk. 2003. *Sejarah dan Peranan Subkoss dalam Perjuangan*

Rakyat Sumbagsel (1945-1949).

Palembang: Komering Jaya.

Umar. 2002. Dokumen Pribadi